

KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (P2-APBN) TAHUN ANGGARAN 2021

**Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, M.Si
Rama Mahesa, S.E
Rindang Mustikawati, S.E**

**Sebagai Bahan Masukan dalam Penyusunan
Pertimbangan DPD RI terhadap
Undang-Undang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN 2021**



KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (P2-APBN) TAHUN ANGGARAN 2021

**Sebagai Bahan Masukan dalam Penyusunan
Pertimbangan DPD RI terhadap
Undang-Undang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN 2021**

**Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, M.Si
Rama Mahesa, S.E
Rindang Mustikawati, S.E**



KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (P2-APBN) TAHUN ANGGARAN 2021

Penulis:

Rasidin Karo-karo Sitepu, Rama Mahesa, Rindang Mustikawati

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

Cetakan Pertama:

Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan **“Kajian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (P2-APBN) Tahun Anggaran 2021”** telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang dinamika pengelolaan dan pelaksanaan program-program dalam APBN.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Agustus 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	2
BAB 2 KINERJA MAKRO EKONOMI DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	3
A. Makroekonomi	3
1. Capaian Asumsi Makroekonomi 2021	4
2. Capaian Postur APBN 2021	6
B. Indikator Kesejahteraan Daerah	8
1. Pertumbuhan Ekonomi	10
2. Kemiskinan	12
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	14
4. Indeks Pembangunan Manusia	17
5. Gini Rasio.....	20
BAB 3 TARGET DAN REALISASI APBN 2021	23
A. Analisis Pendapatan Negara 2021	23
1. Analisa Realisasi Penerimaan Pajak T.A 2021	25
2. Analisa Realisasi Penerimaan PNBP T.A 2021	28
3. Analisa Realisasi Penerimaan Hibah T.A 2021	31
B. Analisis Belanja Negara	32
1. Realisasi Pos Belanja Negara Tahun 2021	32
2. Analisis Post Belanja 2021.....	35
C. Analisis Mandatory APBN Tahun 2021	37
BAB 4 EVALUASI DAN KINERJA PELAKSANAAN APBN 2021	41
A. Gambaran Umum RKP 2021	41
B. Evaluasi terhadap Sasaran Pembangunan 2021	43
C. Evaluasi terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2021	45
1. Prioritas Nasional 1	45
2. Prioritas Nasional 2	46
3. Prioritas Nasional 3	47
4. Prioritas Nasional 4	49
5. Prioritas Nasional 5	48

6. Prioritas Nasional 6	52
7. Prioritas Nasional 7	53
BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI	55
A. Simpulan	55
B. Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Asumsi Makroekonomi dan Realisasi Periode 2020-2021	4
Tabel 2.2. Realisasi Postur APBN 2020-2021	7
Tabel 2.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2020 sd Q1-Q4 2021 (%)	11
Tabel 2.4. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah Sep 2020 - Sep 2021	12
Tabel 2.5. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Periode Tahun 2020-2021 (%)	13
Tabel 2.6. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021 (Juta Jiwa)	15
Tabel 2.7. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 - Agustus 2021	15
Tabel 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Periode Tahun 2020-Q3:2021 (%)	16
Tabel 2.9. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2021 ..	18
Tabel 2.10. Perkembangan Gini Rasio Tahun 2019-2021	21
Tabel 3.1. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan Negara T.A 2021	24
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Negara Dalam APBN 2021 Disandingkan Dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Rp Triliun)	25
Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri T.A 2021	26
Tabel 3.4. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional T.A 2021 ..	28
Tabel 3.5. Realisasi Penerimaan PNBPN SDA T.A 2021	29
Tabel 3.6. PNBPN KND Dari Dividen BUMN T.A 2021	30
Tabel 3.7. Setoran Dividen oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2021 ..	31
Tabel 3.8. Penerimaan Hibah T.A 2021	32
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Negara Tahun 2021 (dalam triliun Rupiah)	33
Tabel 3.10. Rincian Realisasi Dana Desa	35
Tabel 3.11. Rincian realisasi anggaran PEN pada TA 2021 (dalam triliun rupiah)	36
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran TKDD Tahun 2021 (dalam Triliun Rupiah)	37
Tabel 3.13. Alokasi & Realisasi Mandatory Spending Dalam APBN 2020(Rp Triliun)	38
Tabel 4.1. Realisasi Capaian Sasaran Indikator Pembangunan Tahun 2021	43
Tabel 4.2. Realisasi Capaian PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2021	46

Tabel 4.3. Realisasi Capaian PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	47
Tabel 4.4. Realisasi Capaian PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing	48
Tabel 4.5. Realisasi Capaian PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	50
Tabel 4.6. Capaian Kinerja PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	51
Tabel 4.7. Capaian Kinerja PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim	62
Tabel 4.8. Capaian Kinerja PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2021	10
Gambar 2.2. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2015–Maret 2021	20



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang No 6 Tahun 2021 (UU 20/2019) tentang APBN Tahun Anggaran 2020 (APBN TA. 2021) menegaskan bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN 2021 termuat dalam UU tentang APBN 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

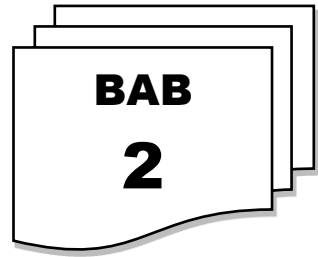
UUD 1945 merupakan dasar hukum paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada UUD 1945. Klausul ini termuat dalam Bab VIII UUD 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berbunyi: Ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan Ayat (3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Salah satu wewenang DPD-RI adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang atas undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dirasa perlu untuk membuat kajian tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021 dalam rangka dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI kepada DPD RI.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kajian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021 ini merupakan salah satu tugas dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPD RI, dalam rangka penyusunan pertimbangan atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBN 2021.



KINERJA MAKRO EKONOMI DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. MAKROEKONOMI

Tahun 2021 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, diperlukan dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif. Namun, demikian di awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19, yang pada tahun 2021 menjadi momentum sebuah transisi percepatan pembangunan ekonomi.

Periode 2020-2021, Pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berkesinambungan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah kebijakan defisit anggaran tersebut dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan akibat dampak Covid-19, menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tema kebijakan fiskal Tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Berkenaan dengan hal tersebut, APBN Tahun 2021 dirumuskan dalam kerangka tujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi langkah perbaikan neraca keuangan pemerintah. APBN dirancang semakin

produktif, efektif, dan efisien sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mewujudkan pemulihan (*recovery*) dan mampu mendorong perbaikan neraca keuangan Pemerintah. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, tercermin pada optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan pemanfaatan momentum dalam melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Kebijakan fiskal Tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

1. Capaian Asumsi Makroekonomi 2021

Kondisi perekonomian global pada Tahun 2021 menunjukkan perbaikan meskipun level pemulihan, terhadap perekonomian di Indonesia. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah memerlukan kebijakan yang luar biasa (*extraordinary policy*). Untuk itu, fleksibilitas diperlukan agar APBN mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk melakukan kebijakan *countercyclical* dalam rangka memitigasi dampak COVID-19, sehingga proses penanganan COVID-19 dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi. Kebijakan extraordinary tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19 menyebabkan di akhir Tahun 2021 sebagian besar indikator utama dalam Asumsi Ekonomi Makro masih mengalami pencapaian yang tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2021, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1. Dimana seluruh variable Asumsi makroekonomi tidak sesuai dengan Target APBN 2021. Namun demikian disbanding 2020, perekonomian cukup membaik pada 2021.

Tabel Error! No text of specified style in document..1. Asumsi Makroekonomi dan Realisasi Periode 2020-2021

No	Indikator	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Asumsi	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen, y-on-y)	-2.07	5.00	3.69	73.80
2	Inflasi (persen, y-on-y)	1.68	3.00	1.87	62.33
3	Tingkat Bunga SBN 10 Tahun (persen)	5.89	7.29	6.38	87.52
4	Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	14577	14600	14312	98.03

5	Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel)	40.39	45.00	68.47	152.16
6	Rata-Rata Lifting Minyak (mbopd)	707	705	660.22	93.65
7	Rata-Rata Lifting Gas (mboepd)	983	1007	994.83	98.79

Sumber: APBN 2021 dan LKPP 2021

Pertumbuhan ekonomi merupakan signal utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang berhubungan dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menyebabkan dampak ekonomi di awal Tahun 2020 mengalami kontraksi, tetapi tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia positif sebesar 3.69% (Y-o-Y). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih rendah dibanding target yang ditentukan dalam APBN yaitu sebesar 5,00%

Laju inflasi sepanjang Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum yaitu sebesar 1.87%, sedangkan pada Tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1.68%. Tingkat inflasi sepanjang Tahun 2021 lebih rendah dari target APBN 2021 yaitu sebesar 3,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih rendah. Selama Tahun 2021, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.312 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada NK APBN 2021 sebesar Rp14.600 per dolar AS. Artinya secara akumulatif nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar sepanjang tahun 2021.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 10 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga Surat Utang Negara (SUN) dengan kupon bunga mengambang. Hingga akhir Desember 2021 tingkat SPN 10 bulan sebesar 6.38% atau di bawah target APBN 2021 yang sebesar 7.3%.

ICP jika dilihat dari sisi penerimaan APBN terlihat pada komponen PNBPN, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi dan penerimaan pajak melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Peningkatan harga minyak dunia sepanjang Tahun 2021 karena adanya sentimen positif terkait *trend* pemulihan ekonomi global yang menyebabkan meningkatnya permintaan. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan minyak dikarenakan kebijakan dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries*

(OPEC) terkait kebijakan pemotongan produksi minyak mentah hingga 2021. Kenaikan harga minyak telah dimulai sejak awal Tahun 2021. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Oktober 2021 mencapai 81,80 dolar AS per barel. Rata-rata realisasi ICP tahun 2021 mencapai 68,47 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 45,00 dolar AS per barel.

Selain pandemi COVID-19 beberapa hal yang mempengaruhi kinerja *demand* dan *supply*, lifting migas Indonesia pada Tahun 2021, adalah terlambatnya implementasi beberapa kegiatan pengeboran serta mundurnya rencana on stream beberapa lapangan migas. Rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama periode Tahun 2021 mencapai 660 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBN sebesar 705 ribu barel per hari. Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama Tahun 2020 sebesar 707 ribu barel per hari. Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi Tahun 2021 mencapai 995 ribu barel setara minyak per hari lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2021 sebesar 1.007 ribu barel setara minyak per hari namun lebih tinggi dari rata-rata realisasi Tahun 2020 sebesar 983 ribu barel setara minyak per hari.

2. Capaian Postur APBN 2021

Pendapatan negara yang optimal merupakan kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan serta merupakan sumber pendanaan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

APBN Tahun 2021, pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBPN. Optimalisasi penerimaan negara telah ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan barang kena cukai (BKC) baru seperti cukai produk plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (*core tax*), organisasi, dan SDM.

Realisasi postur APBN 2021 ditampilkan pada Tabel 2.2. terlihat bawah pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari Target APBN 2021. Hampir di semua pos pendapatan mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi terdapat pada PNBPN. Di sisi lain, belanja negara juga mengalami peningkatan, terutama di komponen Belanja Pemerintah Pusat, sementara transfer ke daerah dan dana desa cenderung menurun.

Tabel Error! No text of specified style in document..2. Realisasi Postur APBN 2020-2021

No	Uraian	Realisasi 2020 (Audited)	Tahun 2021		
			Anggaran	Realisasi	%
A	Pendapatan Negara dan Hibah	1,647.78	1,743.65	2,011.35	115.35
	1. Penerimaan Perpajakan	1,285.14	1,444.54	1,547.84	107.15
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343.81	298.20	458.49	153.75
	3. Penerimaan Hibah	18.83	0.90	5.01	555.27
B	Belanja Negara	2,595.48	2,750.03	2,786.41	101.32
	1. Belanja Pemerintah Pusat	1,832.95	1,954.55	2,000.70	102.36
	2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	762.53	795.48	785.71	98.77
	a. Transfer ke Daerah	691.43	723.48	713.85	98.67
	b. Dana Desa	71.10	72.00	71.85	99.80
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(947.70)	(1,006.38)	(775.06)	77.02

Sumber: APBN 2021 dan LKPP 2021

Momentum transisi menuju normal secara bertahap, penyelesaian permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap, membutuhkan reformasi kebijakan di bidang belanja negara. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain (1) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery); serta (3) re-desain sistem perencanaan dan penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia disingkat dengan APBN. Secara umum tujuan APBN diperuntukkan bagi pembangunan baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan rakyat. Mengetahui tujuan APBN sangat penting agar bisa tahu pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Apakah tujuan APBN dapat berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk lebih memahami tujuan APBN di Indonesia, perlu kita ketahui juga fungsi dan perannya terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa fungsi penting, meliputi fungsi pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi APBN tersebut sesuai yang tercantum dalam pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus di input ke dalam APBN. Berdasarkan penjelasan ini, maka APBN memiliki enam fungsi, yaitu:

1. **Fungsi Alokasi.** Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.
2. **Fungsi Distribusi.** Fungsi distribusi bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.
3. **Fungsi Stabilisasi.** Fungsi stabilitasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.
4. **Fungsi Otoritas.** Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

5. **Fungsi Perencanaan.** Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.
6. **Fungsi Regulasi.** Fungsi regulasi APBN, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Adanya krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan dunia usaha lumpuh. Di sinilah peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian. Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi. Perencanaan APBN akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan serta peningkatan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan serta menghemat pengeluaran.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena padat karya, melainkan bentuk partisipasi yang dilandasi oleh keinginan pemerintah atau keinginan masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembangunan masyarakat tidak semata-mata sebagai buruh (pekerja), tetapi sebagai pelaku atau subyek.

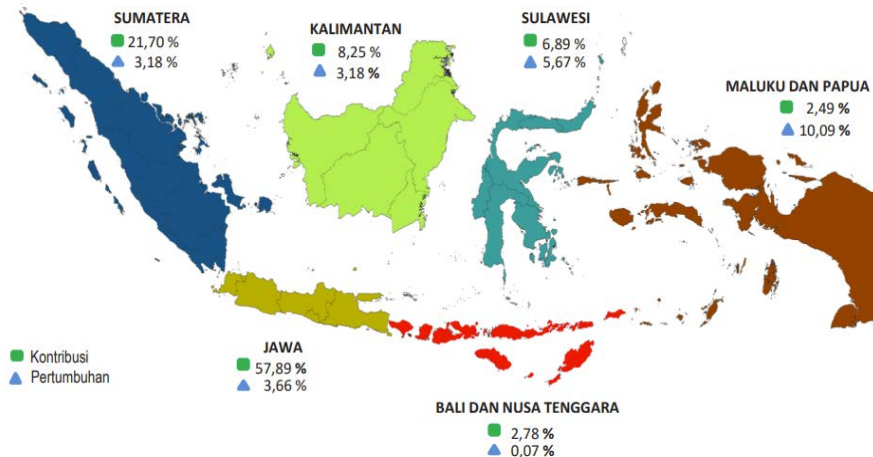
Ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan, pertama perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan perlu kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mau mendengarkan. Kedua pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan sebagai obyek pembangunan.

Pentingnya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk apresiasi bahwa tujuan dari pada pembangunan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan juga ditekankan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka

dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memperoleh hasil dari program tersebut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sejauh ini kontribusi pertumbuhan ekonomi masih di dominasi oleh pulau Jawa dan diikuti oleh pulau Sumatera. Struktur perekonomian Indonesia dilihat berdasarkan spasial pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 57,89 persen; diikuti pulau Sumatera sebesar 21,70 persen; pulau Kalimantan sebesar 8,25 persen; pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78 persen; serta pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49 persen (Gambar 2.1). Kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yang ekonominya banyak dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, tumbuh sebesar 0,07 persen.



Gambar Error! No text of specified style in document..1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2021

Sumber: BPS, 2021

Hal ini dapat dipahami karena pembatasan aktivitas sosial berupa kunjungan wisata terjadi pada masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia tumbuh positif, kecuali untuk provinsi Bali dan Papua Barat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3.7% pada tahun 2021 (Tabel 2.3).

Tabel Error! No text of specified style in document..3.
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2020 sd Q1-
Q4 2021 (%)**

No	Provinsi	2020	2021				Tahunan
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1	ACEH	-0.37	-1.89	2.56	3.02	7.39	2.79
2	SUMATERA UTARA	-1.07	-1.85	4.95	3.67	3.81	2.61
3	SUMATERA BARAT	-1.60	-0.15	5.76	3.31	4.38	3.29
4	RIAU	-1.12	0.40	5.17	4.13	3.81	3.36
5	JAMBI	-0.46	-0.29	5.38	5.94	3.62	3.66
6	SUMATERA SELATAN	-0.11	-0.40	5.71	3.92	5.12	3.58
7	BENGKULU	-0.02	-1.66	6.41	2.78	5.57	3.24
8	LAMPUNG	-1.67	-1.99	5.12	3.00	5.15	2.79
9	KEP. BANGKA BELITUNG	-2.30	0.95	6.85	6.09	6.32	5.05
10	KEP. RIAU	-3.80	-1.19	6.90	2.97	5.27	3.43
11	DKI JAKARTA	-2.36	-1.94	10.93	2.43	3.64	3.56
12	JAWA BARAT	-2.44	-0.80	6.20	3.51	6.21	3.74
13	JAWA TENGAH	-2.65	-0.55	5.87	2.73	5.42	3.32
14	DI YOGYAKARTA	-2.69	5.74	11.88	2.31	2.82	5.53
15	JAWA TIMUR	-2.39	-0.44	7.07	3.27	4.59	3.57
16	BANTEN	-3.38	-0.46	8.92	4.51	5.19	4.44
17	BALI	-9.31	-9.80	2.83	-2.93	0.51	-2.47
18	NUSA TENGGARA BARAT	-0.64	-1.18	4.77	2.42	3.16	2.30
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-0.83	0.22	4.32	2.36	3.10	2.51
20	KALIMANTAN BARAT	-1.82	-0.10	10.81	4.60	4.31	4.78
21	KALIMANTAN TENGAH	-1.40	-3.11	5.58	3.68	7.61	3.40
22	KALIMANTAN SELATAN	-1.81	-1.18	4.58	4.88	5.55	3.48
23	KALIMANTAN TIMUR	-2.85	-2.96	5.79	4.51	2.91	2.48
24	KALIMANTAN UTARA	-1.11	-2.01	5.81	5.23	7.08	3.98
25	SULAWESI UTARA	-0.99	1.87	8.49	3.15	3.38	4.16
26	SULAWESI TENGAH	4.86	7.18	16.66	11.07	11.90	11.70
27	SULAWESI SELATAN	-0.70	-0.21	7.70	3.25	7.89	4.65
28	SULAWESI TENGGARA	-0.65	0.06	4.26	4.18	7.66	4.10
29	GORONTALO	-0.02	-1.93	3.43	3.01	5.26	2.41
30	SULAWESI BARAT	-2.42	-1.24	5.25	2.93	3.32	2.56
31	MALUKU	-0.92	-1.77	4.56	4.12	5.33	3.04
32	MALUKU UTARA	4.92	13.33	18.50	12.44	21.00	16.40
33	PAPUA BARAT	-0.77	1.50	-2.69	-1.98	1.03	-0.51
34	PAPUA	2.32	14.67	13.50	14.89	17.16	15.11
34 PROVINSI		-2.02	-0.74	7.19	3.52	5.02	3.70

Sumber: BPS 2022 (diolah)

Tahun 2020, seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang berbeda-beda, kecuali untuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontraksi pertumbuhan ini dapat dipahami, mengingat pada waktu tersebut, telah terjadi pandemic Covid-19, dan kebijakan saat itu adalah mengurangi dan bahkan membatasi aktivitas pergerakan baik barang maupun manusia.

2. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 0,01 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,12 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 138,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145,0 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88 persen menjadi 7,89 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen (Tabel 2.4).

Tabel Error! No text of specified style in document..4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah Sep 2020 - Sep 2021

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Sep-20	12,04	7,88
Mar-21	12,18	7,89
Sep-21	11,86	7,60
Perdesaan		
Sep-20	15,51	13,20
Mar-21	15,37	13,10
Sep-21	14,64	12,53
Total		
Sep-20	27,55	10,19
Mar-21	27,54	10,14
Sep-21	26,50	9,71

Sumber: BPS (2021)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,73 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89 persen menjadi 7,60 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,53 persen. Persentase penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal terbesar terdapat di daerah perdesaan. Tetapi yang menarik adalah bahwa periode September 2020 – Maret 2021 bahwa penduduk miskin secara absolut sebesar 1.04 juta jiwa, ini menunjukkan bahwa kemungkinan strategi dalam mengatasi pandemi dan program PEN yang dicetuskan pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagai dampak dari Pandemi-Covid19. Sementara penduduk miskin menurut provinsi secara keseluruhan ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel Error! No text of specified style in document..5.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Periode
Tahun 2020-2021 (%)

No	Provinsi	2020		2021		Δ 2021 (%) Sept-Maret
		Maret	September	Maret	September	
1	ACEH	14.99	15.43	15.33	15.53	1.30
2	SUMATERA UTARA	8.75	9.14	9.01	8.49	-5.77
3	SUMATERA BARAT	6.28	6.56	6.63	6.04	-8.90
4	RIAU	6.82	7.04	7.12	7.00	-1.69
5	JAMBI	7.58	7.97	8.09	7.67	-5.19
6	SUMATERA SELATAN	12.66	12.98	12.84	12.79	-0.39
7	BENGGULU	15.03	15.30	15.22	14.43	-5.19
8	LAMPUNG	12.34	12.76	12.62	11.67	-7.53
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4.53	4.89	4.90	4.67	-4.69
10	KEP. RIAU	5.92	6.13	6.12	5.75	-6.05
11	DKI JAKARTA	4.53	4.69	4.72	4.67	-1.06
12	JAWA BARAT	7.88	8.43	8.40	7.97	-5.12
13	JAWA TENGAH	11.41	11.84	11.79	11.25	-4.58
14	DI YOGYAKARTA	12.28	12.80	12.80	11.91	-6.95
15	JAWA TIMUR	11.09	11.46	11.40	10.59	-7.11
16	BANTEN	5.92	6.63	6.66	6.50	-2.40

No	Provinsi	2020		2021		Δ 2021 (%)
		Maret	September	Maret	September	Sept-Maret
17	BALI	3.78	4.45	4.53	4.72	4.19
18	NUSA TENGGARA BARAT	13.97	14.23	14.14	13.83	-2.19
19	NUSA TENGGARA TIMUR	20.90	21.21	20.99	20.44	-2.62
20	KALIMANTAN BARAT	7.17	7.24	7.15	6.84	-4.34
21	KALIMANTAN TENGAH	4.82	5.26	5.16	5.16	0.00
22	KALIMANTAN SELATAN	4.38	4.83	4.83	4.56	-5.59
23	KALIMANTAN TIMUR	6.10	6.64	6.54	6.27	-4.13
24	KALIMANTAN UTARA	6.80	7.41	7.36	6.83	-7.20
25	SULAWESI UTARA	7.62	7.78	7.77	7.36	-5.28
26	SULAWESI TENGAH	12.92	13.06	13.00	12.18	-6.31
27	SULAWESI SELATAN	8.72	8.99	8.78	8.53	-2.85
28	SULAWESI TENGGARA	11.00	11.69	11.66	11.74	0.69
29	GORONTALO	15.22	15.59	15.61	15.41	-1.28
30	SULAWESI BARAT	10.87	11.50	11.29	11.85	4.96
31	MALUKU	17.44	17.99	17.87	16.30	-8.79
32	MALUKU UTARA	6.78	6.97	6.89	6.38	-7.40
33	PAPUA BARAT	21.37	21.70	21.84	21.82	-0.09
34	PAPUA	26.64	26.80	26.86	27.38	1.94
	INDONESIA	9.78	10.19	10.14	9.71	-4.24

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah pulau Maluku dan Papua. Periode September 2021- Maret 2021 hanya terdapat 4 provinsi yang mengalami peningkatan yaitu provinsi Aceh, Provinsi Bali, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pada periode tersebut persentase penduduk miskin menurun terbesar terdapat di provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku. Dari Tabel 2.5. juga dapat diketahui bahwa pada periode September 2021 persentase penduduk miskin terbesar terdapat di provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 27.38%, 21.84% dan 20.99%. Hal ini juga menjelaskan bahwa sebaran penduduk miskin masih terdapat di pulau Papua dan pulau Maluku.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami kecenderungan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 206,71 juta orang, naik sebanyak 2,74 juta orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 1,35 juta orang jika dibanding Februari 2021 (BPS, 2021). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 140,15 juta orang (67,80 persen), sisanya termasuk

bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 131,05 juta orang penduduk yang bekerja dan 9,10 juta orang pengangguran (BPS, 2021). Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2,60 juta orang dan pengangguran turun sebanyak 670 ribu orang. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 340 ribu orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 10 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 350 ribu orang (Tabel 2.6).

Tabel Error! No text of specified style in document..6.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Agustus 2020-Agustus 2021 (Juta Jiwa)

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021
Penduduk Usia Kerja	203,97	205,36	206,71
Angkatan Kerja	138,22	139,81	140,15
1. Bekerja	128,45	131,06	131,05
2. Pengangguran	9,77	8,75	9,10
Bukan Angkatan kerja	65,75	65,55	66,56

Sumber: BPS (2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan tidak termanfaatkannya *supply* tenaga kerja. TPT hasil Agustus 2021 sebesar 6,49 persen. Yang mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur.

Tabel Error! No text of specified style in document..7.
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja,
Agustus 2020 - Agustus 2021

No	Komponen	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021
1	Pengangguran karena Covid-19	2,56	1,62	1,82
2	BAK ² karena COVID-19	0,76	0,65	0,70
3	Sementara tidak bekerja ³ karena Covid-19	1,77	1,11	1,39
4	Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja	24,03	15,72	17,41
Total		29,12	19,10	21,32
Penduduk Usia Kerja (PUK)		203,97	205,36	206,71
Penduduk Usia Kerja				

Angkatan Kerja

Sumber: BPS (2021)

Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran atau Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pandemi COVID-19 juga menyebabkan sebagian penduduk menjadi sementara tidak bekerja atau mengalami pengurangan jam kerja (Tabel 2.7). Tabel 2.7 menunjukkan bahwa Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 21,32 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 7,80 juta orang atau sebesar 26,77 persen jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (BPS, 2021). Jika dibandingkan Februari 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 2,22 juta orang (11,67 persen). Sebaran tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi di tampilkan pada Tabel 2.8. Secara spasial tingkat pengangguran pengangguran terbuka Agustus 2021 sebesar 6.49% meningkat sebesar 3.67% jika dibandingkan dengan Februari 2021, tetapi beberapa provinsi relative menurun dua digit. Secara keseluruhan terlihat memang tingkat pengangguran masih meningkat.

Tabel Error! No text of specified style in document..8.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Periode Tahun 2020-Q3:2021 (%)

No	Provinsi	2020		2021		Δ(%) Feb-Ags
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	
1	ACEH	5.40	6.59	6.30	6.30	0.00
2	SUMATERA UTARA	4.71	6.91	6.01	6.33	5.32
3	SUMATERA BARAT	5.25	6.88	6.67	6.52	-2.25
4	RIAU	4.92	6.32	4.96	4.42	-10.89
5	JAMBI	4.26	5.13	4.76	5.09	6.93
6	SUMATERA SELATAN	3.90	5.51	5.17	4.98	-3.68
7	BENGGULU	3.08	4.07	3.72	3.65	-1.88
8	LAMPUNG	4.26	4.67	4.54	4.69	3.30
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3.35	5.25	5.04	5.03	-0.20
10	KEP. RIAU	5.98	10.34	10.12	9.91	-2.08
11	DKI JAKARTA	5.15	10.95	8.51	8.50	-0.12
12	JAWA BARAT	7.71	10.46	8.92	9.82	10.09
13	JAWA TENGAH	4.20	6.48	5.96	5.95	-0.17

No	Provinsi	2020		2021		Δ(%) Feb-Ags
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	
14	DI YOGYAKARTA	3.38	4.57	4.28	4.56	6.54
15	JAWA TIMUR	3.60	5.84	5.17	5.74	11.03
16	BANTEN	7.99	10.64	9.01	8.98	-0.33
17	BALI	1.25	5.63	5.42	5.37	-0.92
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.04	4.22	3.97	3.01	-24.18
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.64	4.28	3.38	3.77	11.54
20	KALIMANTAN BARAT	4.47	5.81	5.73	5.82	1.57
21	KALIMANTAN TENGAH	3.33	4.58	4.25	4.53	6.59
22	KALIMANTAN SELATAN	3.67	4.74	4.33	4.95	14.32
23	KALIMANTAN TIMUR	6.72	6.87	6.81	6.83	0.29
24	KALIMANTAN UTARA	5.71	4.97	4.67	4.58	-1.93
25	SULAWESI UTARA	5.34	7.37	7.28	7.06	-3.02
26	SULAWESI TENGAH	2.93	3.77	3.73	3.75	0.54
27	SULAWESI SELATAN	5.70	6.31	5.79	5.72	-1.21
28	SULAWESI TENGGARA	3.10	4.58	4.22	3.92	-7.11
29	GORONTALO	3.29	4.28	3.41	3.01	-11.73
30	SULAWESI BARAT	2.39	3.32	3.28	3.13	-4.57
31	MALUKU	6.71	7.57	6.73	6.93	2.97
32	MALUKU UTARA	4.09	5.15	5.06	4.71	-6.92
33	PAPUA BARAT	6.78	6.80	6.18	5.84	-5.50
34	PAPUA	3.42	4.28	3.77	3.33	-11.67
	INDONESIA (34 Provinsi)	4.94	7.07	6.26	6.49	3.67

Sumber: BPS, (2021)

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan. Konsep pembangunan manusia ini pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan Human Development Report (HDR) yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP tersebut bukan hanya menempatkan manusia sebagai input dari pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan, yaitu

menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga dapat memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup yang layak. Human Development Report juga memberikan rekomendasi pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 2014, Indonesia mengimplementasikan metode penghitungan IPM terbaru untuk menghitung IPM yang disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Pertumbuhan IPM Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup berarti dengan hanya tumbuh sebesar 0,028 persen secara nasional. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat. Perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 juga dialami oleh seluruh provinsi bahkan ada yang mengalami penurunan. Dari sisi posisi, perbandingan IPM antarprovinsi tidak mengalami banyak perubahan. Capaian IPM tertinggi masih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (80,77), sedangkan capaian terendah ditempati Provinsi Papua (60,44). Jika dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 11 provinsi yang memiliki capaian IPM di atas angka nasional. Pada tahun 2020 terdapat 24 provinsi yang mengalami peningkatan IPM, sedangkan 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. Jika dilihat dari pemerataan pembangunan manusia, dalam satu dekade terakhir kesenjangan capaian pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia sudah mulai turun meskipun dalam taraf yang relatif lambat.

Tabel Error! No text of specified style in document..9.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019-2021

Provinsi	Tahun			[7]	
	2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
ACEH	71.90	71.99	72.18	0.125	0.264
SUMATERA UTARA	71.74	71.77	72.00	0.042	0.320
SUMATERA BARAT	72.39	72.38	72.65	-0.014	0.373
RIAU	73.00	72.71	72.94	-0.397	0.316
JAMBI	71.26	71.29	71.63	0.042	0.477

SUMATERA SELATAN	70.02	70.01	70.24	-0.014	0.329
BENGKULU	71.21	71.40	71.64	0.267	0.336
LAMPUNG	69.57	69.69	69.90	0.172	0.301
KEP. BANGKA BELITUNG	71.30	71.47	71.69	0.238	0.308
KEP. RIAU	75.48	75.59	75.79	0.146	0.265
DKI JAKARTA	80.76	80.77	81.11	0.012	0.421
JAWA BARAT	72.03	72.09	72.45	0.083	0.499
JAWA TENGAH	71.73	71.87	72.16	0.195	0.404
DI YOGYAKARTA	79.99	79.97	80.22	-0.025	0.313
JAWA TIMUR	71.50	71.71	72.14	0.294	0.600
BANTEN	72.44	72.45	72.72	0.014	0.373
BALI	75.38	75.50	75.69	0.159	0.252
NUSA TENGGARA BARAT	68.14	68.25	68.65	0.161	0.586
NUSA TENGGARA TIMUR	65.23	65.19	65.28	-0.061	0.138
KALIMANTAN BARAT	67.65	67.66	67.90	0.015	0.355
KALIMANTAN TENGAH	70.91	71.05	71.25	0.197	0.281
KALIMANTAN SELATAN	70.72	70.91	71.28	0.269	0.522
KALIMANTAN TIMUR	76.61	76.24	76.88	-0.483	0.839
KALIMANTAN UTARA	71.15	70.63	71.19	-0.731	0.793
SULAWESI UTARA	72.99	72.93	73.30	-0.082	0.507
SULAWESI TENGAH	69.50	69.55	69.79	0.072	0.345
SULAWESI SELATAN	71.66	71.93	72.24	0.377	0.431
SULAWESI TENGGARA	71.20	71.45	71.66	0.351	0.294
GORONTALO	68.49	68.68	69.00	0.277	0.466
SULAWESI BARAT	65.73	66.11	66.36	0.578	0.378
MALUKU	69.45	69.49	69.71	0.058	0.317
MALUKU UTARA	68.70	68.49	68.76	-0.306	0.394
PAPUA BARAT	64.70	65.09	65.26	0.603	0.261
PAPUA	60.84	60.44	60.62	-0.657	0.298
INDONESIA	71.92	71.94	72.29	0.028	0.487

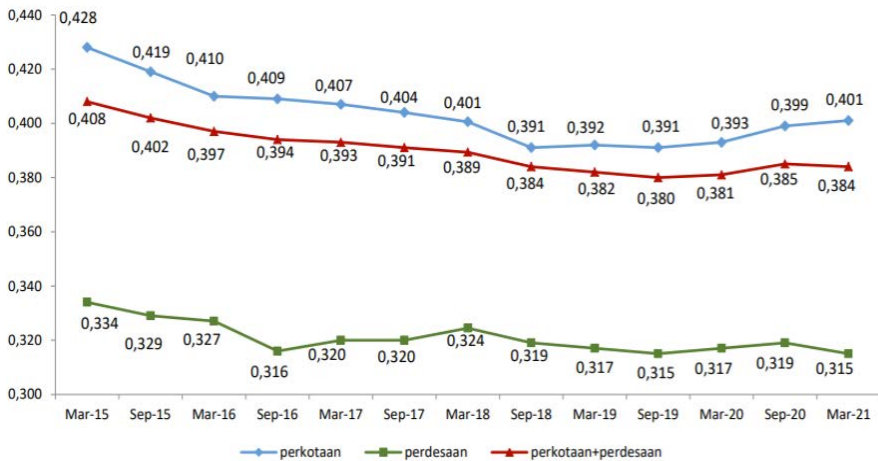
Sumber: BPS 2021 (diolah)

Pada periode 2010-2020, disparitas IPM antarprovinsi jauh lebih rendah dibandingkan disparitas IPM kabupaten/kota. Namun, penurunan disparitas pada level kabupaten/kota lebih terlihat nyata. Peningkatan pembangunan manusia memerlukan upaya yang tepat dan terkoordinasi dan saling mendukung antar bidang. Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia di Indonesia. Karenanya, kebersamaan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan. Dari fakta Tabel 2.9 dapat disimpulkan target Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 72,51 yang ditetapkan dalam APBN 2020 tidak

tercapai, namun secara keseluruhan periode 2020-2021 relatif mengalami peningkatan di setiap provinsi.

5. Gini Rasio

Rasio Gini atau koefisien gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).



Gambar Error! No text of specified style in document...2. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2015–Maret 2021

Secara nasional, sejak Maret 2015 angka Gini Ratio mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai Gini Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020 lalu kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 (Gambar 2.2).

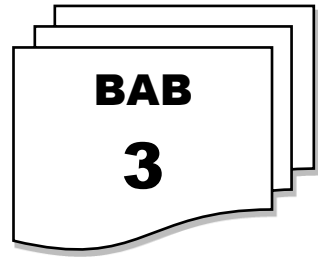
Tabel Error! No text of specified style in document..10.**Perkembangan Gini Rasio Tahun 2019-2021**

No	PROVINSI	Gini Ratio					
		2019		2020		Δ%	2021
		Maret	Sept	Maret	Sept		
1	ACEH	0.320	0.321	0.323	0.319	-0.623	0.324
2	SUMATERA UTARA	0.320	0.315	0.316	0.314	-0.317	0.314
3	SUMATERA BARAT	0.310	0.307	0.305	0.301	-1.954	0.306
4	RIAU	0.330	0.331	0.329	0.321	-3.021	0.326
5	JAMBI	0.320	0.324	0.320	0.316	-2.469	0.321
6	SUMATERA SELATAN	0.330	0.339	0.339	0.338	-0.295	0.341
7	BENGKULU	0.340	0.329	0.334	0.323	-1.824	0.326
8	LAMPUNG	0.330	0.331	0.327	0.320	-3.323	0.323
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0.270	0.262	0.262	0.257	-1.908	0.256
10	KEP. RIAU	0.340	0.337	0.339	0.334	-0.890	0.343
11	DKI JAKARTA	0.390	0.391	0.399	0.400	2.302	0.409
12	JAWA BARAT	0.400	0.398	0.403	0.398	0.000	0.412
13	JAWA TENGAH	0.360	0.358	0.362	0.359	0.279	0.372
14	DI YOGYAKARTA	0.420	0.428	0.434	0.437	2.103	0.441
15	JAWA TIMUR	0.370	0.364	0.366	0.364	0.000	0.374
16	BANTEN	0.370	0.361	0.363	0.365	1.108	0.365
17	BALI	0.370	0.370	0.369	0.369	-0.270	0.378
18	NUSA TENGGARA BARAT	0.380	0.374	0.376	0.386	3.209	0.381
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0.360	0.355	0.354	0.356	0.282	0.346
20	KALIMANTAN BARAT	0.330	0.318	0.317	0.325	2.201	0.313
21	KALIMANTAN TENGAH	0.340	0.335	0.329	0.320	-4.478	0.323
22	KALIMANTAN SELATAN	0.330	0.334	0.332	0.351	5.090	0.330
23	KALIMANTAN TIMUR	0.330	0.335	0.328	0.335	0.000	0.334
24	KALIMANTAN UTARA	0.300	0.292	0.292	0.300	2.740	0.292
25	SULAWESI UTARA	0.370	0.376	0.370	0.368	-2.128	0.365
26	SULAWESI TENGAH	0.330	0.330	0.326	0.321	-2.727	0.316
27	SULAWESI SELATAN	0.390	0.391	0.389	0.382	-2.302	0.382
28	SULAWESI TENGGARA	0.400	0.393	0.389	0.388	-1.272	0.390
29	GORONTALO	0.410	0.410	0.408	0.406	-0.976	0.408
30	SULAWESI BARAT	0.370	0.365	0.364	0.356	-2.466	0.356
31	MALUKU	0.320	0.320	0.318	0.326	1.875	0.314
32	MALUKU UTARA	0.310	0.310	0.308	0.290	-6.452	0.300
33	PAPUA BARAT	0.390	0.381	0.382	0.376	-1.312	0.380
34	PAPUA	0.390	0.391	0.392	0.395	1.023	0.397
	INDONESIA	0.380	0.380	0.381	0.385	1.316	0.384

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,002 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,399 dan meningkat sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,393.

Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,315, turun sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi September 2020 dan sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2020. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2020 dan Maret 2020 masing-masing tercatat sebesar 0,319 dan 0,317. Pada September 2020, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,437. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung (0.257) dan Maluku Utara (0.290). (Tabel 2.6). Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,385, terdapat enam provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,437), Gorontalo (0.406), DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), dan Sulawesi Tenggara (0,388).



TARGET DAN REALISASI APBN 2021

A. ANALISIS PENDAPATAN NEGARA 2021

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah merupakan aspek utama dan strategis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan lapangan kerja (BPK RI, 2022).

Secara umum, dalam kebijakan pendapatan negara dalam APBN Tahun 2021, Pemerintah berupaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur antara lain, pembebasan

PPh impor dan percepatan restitusi PPN. Optimalisasi penerimaan negara akan ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan BKC baru seperti cukai produk plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (*core tax*), organisasi, dan SDM.

Sementara itu, kebijakan di sektor PNBP diarahkan untuk (1) menyempurnakan tata kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan; (2) mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan yang terjangkau (*affordable*), tersedia (*available*), dan

berkelanjutan (*sustainable*). Perkembangan postur pendapatan negara tahun 2020 dan 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document..11.
Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan Negara T.A 2021

(triliun rupiah)

Jenis Pendapatan	2021		2020
	LKPP 2021 audited	APBN	LKPP (audited)
Pendapatan Dalam Negeri	2.006,43	1.742,74	1.628,95
Penerimaan Perpajakan	1.547,84	1.444,54	1.285,14
PNBP	458,49	298,20	343,81
Penerimaan Hibah	5,01	0,90	18,83
Total Pendapatan Negara	2.011,34	1.743,64	1.647,78

Sumber: APBN 2021, LKPP 2021 audited adn LKPP 2020 audited (diolah)

Dukungan pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk insentif perpajakan antara lain berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Bea masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Pembebasan Bea Masuk dan Tidak dipungut PDRI atas Impor barang dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 2%. Berikut disajikan perkembangan postur pendapatan negara tahun anggaran 2021.

Tabel Error! No text of specified style in document..12.
Realisasi Pendapatan Negara Dalam APBN 2021 Disandingkan
Dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Rp Triliun)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Penerimaan Perpajakan	1.547,84	1.285,14	20,44%
1. Pajak Dalam Negeri	1.474,15	1.248,42	18,08
2. Pajak Perdagangan Internasional	73,70	36,72	100,69
II. PNBP	458,49	343,81	33,35%
1. Penerimaan SDA	149,49	97,23	53,76
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30,50	66,08	53,85)
3. PNBP lainnya	152,50	111,20	37,14
4. Pendapatan BLU	126,00	69,31	81,80
III. Penerimaan Hibah	5,01	18,83	(73,38%)
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	2.011,35	1.647,78	22,06%

1. Analisa Realisasi Penerimaan Pajak T.A 2021

Realisasi penerimaan pajak TA 2021 mencapai Rp1.547,84 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,44 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.285,14 triliun. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi penerimaan perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp4,339 triliun dimana angka tersebut naik sebesar 153,83% dibandingkan realisasi tahun 2020. Tingginya angka realisasi DTP tersebut dikarenakan besarnya insentif yang dikeluarkan Pemerintah atas beberapa jenis pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mayoritas sektor penerimaan pajak utama mengalami pertumbuhan dibandingkan realisasi tahun 2020 yang lalu. PPN Dalam Negeri yang merupakan salah satu contributor penerimaan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan sebesar 13,29%, sementara PPh Badan mengalami kenaikan sebesar 26,43%. Kinerja impor juga mengalami kenaikan positif yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh baik. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif sebesar 6,86%.

Tabel Error! No text of specified style in document..13.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri T.A 2021

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
PPh Migas	52.839.016.587.122	33.026.736.126.169
PPh Nonmigas	626.945.306.149.270	545.850.307.089.643
PPh Ditanggung Pemerintah	16.892.265.502.944	15.156.290.554.678
PPN	533.815.503.271.088	439.836.453.302.524
PPnBM	8.248.489.920.685	8.555.391.322.228
PPN Ditanggung Pemerintah	9.836.487.713.903	1.936.218.632.936
PBB	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766
Cukai	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576
Pajak Lainnya	7.830.800.885.996	5.580.584.954.473
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	3.295.175.080.387	1.210.205.384.312
Jumlah	1.474.145.658.872.531	1.248.415.111.170.305

Sumber : LKPP 2021, Kementerian Keuangan, 2021.

Kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 diakibatkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja dan pemanfaatan insentif fiskal, PPh 22 Impor dan PPN Impor melesat naik dikarenakan oleh membaiknya aktivitas impor. PPh Badan berkembang baik karena perbaikan kondisi ekonomi yang mengakibatkan naiknya profitabilitas badan usaha pada tahun 2020, yang merupakan dasar perhitungan pajak tahun 2021, PPh Final tertekan akibat terbatasnya aktivitas konstruksi di masa pandemi serta penurunan suku bunga, PPN DN tumbuh positif akibat membaiknya konsumsi rumah tangga, menurunnya restitusi akibat pemanfaatan kebijakan insentif restitusi dipercepat, serta menurunnya intensitas penerapan PSBB.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kenaikan penerimaan. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor terbesar dari sektor PPN tumbuh 13,29% sementara PPh Badan naik lebih tinggi sebesar 26,43%. Kinerja impor juga mengalami kenaikan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh positif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif. Penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh membaiknya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari penurunan kasus positif Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang naik dengan pertumbuhan 6,86%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp22,79 triliun, dengan pertumbuhan 35,28% dibandingkan tahun 2020. Realisasi ini mencapai 114,36% dari target tahun 2021 sebesar Rp19,93 triliun. Kenaikan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dan ekspor komoditas Tambang Batubara yang tumbuh positif.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat kepatuhan sukarela WP OP. Secara sektoral, 78% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 6,86%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp196,067 triliun dengan pertumbuhan 26,43% dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi PPh Badan mencapai 91,16% dari target sebesar Rp215,01 triliun. Pencapaian realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh mulai membaiknya ekonomi domestik maupun global, membaiknya profitabilitas perusahaan di tahun 2020 dan mulai bergerak naik harga komoditas utama, serta menurunnya angka restitusi pajak. Realisasi penerimaan PPnBM DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar – 12,14%, secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor, dimana di dalamnya termasuk penjualan kendaraan yang terutang PPnBM.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri mengalami penurunan yang disebabkan oleh penerapan insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Penurunan PPnBM DN juga terjadi pada sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan sektor Real Estat. Peningkatan PPnBM Impor terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Mobil.

Pajak Bumi dan Bangunan menurun pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh menurunnya PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi. Peningkatan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai, dan kenaikan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN.

Pertumbuhan negatif PBB pada tahun ini terutama disebabkan oleh kinerja PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang mengalami perlambatan. Namun realisasi Pajak Lainnya mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai. Pertumbuhan penerimaan cukai dipengaruhi oleh faktor pelunasan maju, meningkatnya produksi Hasil Tembakau, dan adanya extra effort melalui pemberantasan peredaran rokok ilegal (Operasi Gempur).

Tabel Error! No text of specified style in document..14.
Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
T.A 2021

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Bea Masuk	39.122.672.165.783	32.443.498.968.565
Bea Keluar	34.572.720.606.310	4.277.706.996.929
Jumlah	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494

Sumber : LKPP 2021, Kementerian Keuangan, 2022

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2021 sebesar Rp73.695.392.772.093 atau mencapai 210,80 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp34.960.548.454.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2021 lebih besar Rp 36.974.186.806.599 atau naik 100,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp36.721.205.965.494. Realisasi Pendapatan Bea Masuk TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,59 persen jika dibandingkan dengan TA 2020 dikarenakan adanya peningkatan devisa bayar dan serta membaiknya kinerja impor nasional. Kenaikan devisa bayar tersebut terutama dari peningkatan aktivitas impor selama tahun 2021. Bea Masuk dipengaruhi oleh beberapa komoditas impor yang bertumbuh terutama impor bahan baku dan impor barang konsumsi.

Realisasi Pendapatan Bea Keluar mengalami kenaikan sebesar 708,21 persen jika dibandingkan Tahun 2020, terutama dipengaruhi kenaikan penerimaan Bea Keluar dari Produk Kelapa Sawit. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan volume ekspor Produk Kelapa Sawit dan pengenaan Bea Keluar dengan tarif yang lebih besar pada tahun 2021. Penerimaan Bea Keluar juga dipengaruhi oleh penerimaan dari ekspor tembaga karena peningkatan volume ekspor dan kenaikan harga tembaga.

Pendapatan Bea Masuk mencapai 101,92% dari target, namun mengalami penurunan 13,55% dibanding tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya insentif penanganan Covid-19 dan aktivitas impor nasional yang melambat, Pelemahan perdagangan internasional maupun aktivitas ekonomi nasional khususnya akibat pandemi Covid-19.

Melemahnya aktivitas impor ditandai dengan penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap USD yang merupakan dampak dari tekanan aktivitas impor selama tahun 2020, yang mana importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA, Thailand, dan Korea Selatan mengalami penurunan.

Pendapatan Bea Keluar mencapai 258,76% dari target, dan menunjukkan pertumbuhan 21,30 persen dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, penerimaan extra effort tembaga, dan meningkatnya ekspor CPO dan biji kakao. Penerimaan dari CPO meningkat disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /MT sehingga dikenai Bea Keluar. Pada tahun 2020 terdapat kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal tahun, sehingga tidak ada penerimaan dari ekspor bijih nikel.

2. Analisa Realisasi Penerimaan PNBP T.A 2021

Realisasi PNBP TA 2021 sebesar Rp458.492.978.338.622 atau mencapai 153,75 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp298.204.166.025.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2021 lebih besar Rp114.678.768.506.059 atau 33,35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp343.814.209.832.563. Realisasi PNBP berasal dari i) Penerimaan Sumber Daya Alam, ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, iii) PNBP Lainnya, dan iv) Pendapatan BLU.

Kenaikan realisasi PNBP dibandingkan dengan realisasi tahun lalu terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas baik migas maupun nonmigas), kenaikan pendapatan PNBP kementerian/lembaga, serta kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum BLU).

Tabel Error! No text of specified style in document..15.
Realisasi Penerimaan PNBP SDA T.A 2021

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	64.998.824.686.934	44.868.847.085.493
Pendapatan Gas Bumi	31.617.569.168.427	24.211.325.322.339
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	44.835.418.882.229	21.178.987.879.156
Pendapatan Kehutanan	5.400.260.383.957	4.403.263.272.502
Pendapatan Perikanan	708.187.057.318	600.662.766.888
Pendapatan Panas Bumi	1.929.107.739.858	1.961.980.946.441
Jumlah	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619

Sumber : LKPP 2021, Kementerian Keuangan, 2022

Kenaikan realisasi PNBP SDA utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, terutama harga minyak mentah Indonesia ICP), mineral, dan batubara. Pertumbuhan kenaikan PNBP SDA Migas ditopang oleh naiknya ICP dalam 12 bulan terakhir, walaupun tidak diiringi dengan kenaikan lifting minyak bumi.

Pendapatan Gas Bumi Tahun 2021 sebesar Rp31.617.569.168.427 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBPN SDA Migas yang menyebabkan perubahan alokasi dari pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi.

Peningkatan realisasi PNBPN Nonmigas utamanya disebabkan oleh naiknya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata sebesar USD121.47/ton naik 108 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD58.17/ton, kenaikan gas alam di Eropa yang mengakibatkan biaya pembangkit listrik dengan gas alam menjadi lebih mahal dan mulai beralih ke batubara dan permintaan batubara yang tinggi terutama Cina, kenaikan produksi batu bara, serta kenaikan harga komoditas mineral lainnya seperti tembaga, nikel, dan timah.

Kenaikan realisasi PNBPN Kehutanan utamanya disebabkan oleh peningkatan realisasi produksi kayu, peningkatan penggunaan kawasan hutan, dan pembayaran piutang PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan PKH).

Sedangkan kenaikan pada PNBPN SDA Perikanan disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan.

**Tabel Error! No text of specified style in document..16.
PNBPN KND Dari Dividen BUMN T.A 2021**

No.	Uraian	TA 2021 (audited)	TA 2020 (audited)
1.	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	29.542.724.205.314	43.888.106.053.599
2.	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	954.099.088.563	710.827.000.000
3.	Pendapatan dari Surplus Lembaga	0	21.481.610.487.738
Jumlah		30.496.823.293.877	66.080.543.541.337

Sumber: LKPP 2021, Kementerian Keuangan, 2022

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2021 sebesar Rp30.496.823.293.877 atau mencapai 116,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp26.130.490.000.000. Hal ini berarti Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2021 lebih kecil Rp35.583.720.247.460 atau turun 53,85 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp66.080.543.541.337.

Penurunan penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan dipicu karena pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara keseluruhan terutama terhadap kinerja keuangan BUMN, baik BUMN Perbankan maupun BUMN non perbankan.

Penurunan juga disebabkan karena tidak adanya setoran PNPB dari Sisa Surplus BI disebabkan rasio modal Bank Indonesia sebesar 8,6 persen di bawah threshold 10 persen), sesuai Laporan Keuangan BI Tahun Buku 2020. Sehingga pada tahun 2021, sesuai ketentuan maka tidak ada kewajiban Bank Indonesia untuk menyetor PNPB dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Pembelian Bank Indonesia atas SBN Pemerintah melalui skema Surat Keputusan Bersama (SKB) I pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap besarnya surplus yang dibukukan oleh Bank Indonesia pada tahun buku 2020 dan berdampak pada Sisa Surplus BI pada tahun 2021. Untuk Setoran Dividen masih didominasi oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2021, dengan data sebagai berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document..17.

Setoran Dividen oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2021

	Uraian	Jumlah
1	PT Telekomunikasi Indonesia Persero) Tbk	8.669.711.421.616
2	PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk	6.923.396.161.010
3	PT Bank Mandiri Persero) Tbk	6.167.609.511.000
4	PT Pertamina Persero)	4.000.000.000.000
5	PT Pegadaian Persero)	1.010.994.037.236
6	PT Pupuk Indonesia Persero)	588.030.000.000
7	PT Sarana Multi Infrastruktur	572.022.000.000
8	PT Semen Indonesia Persero) Tbk	569.745.176.840
9	PT Pelabuhan Indonesia II Persero)	560.000.000.000
10	PT Bank Negara Indonesia Persero) Tbk	492.577.663.633
	BUMN Lainnya	942.737.322.542
	Jumlah	30.496.823.293.877

Sumber: LKPP 2021, Kementerian Keuangan, 2022

3. Analisa Realisasi Penerimaan Hibah T.A 2021

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2021 sebesar Rp5.013.042.434.686 atau 555,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp902.816.508.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2021 lebih rendah Rp13.819.772.785.938 atau lebih rendah 73,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp18.832.815.220.624. Penurunan realisasi penerimaan hibah terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan hibah dalam negeri langsung terkait penyelenggaraan Pilkada seperti pada TA 2020. Namun demikian, realisasi Penerimaan Hibah yang melampaui target APBN

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsung kepada BUN. Terkait dengan pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 (Sayadi, 2021).

Tabel Error! No text of specified style in document..18.
Penerimaan Hibah T.A 2021

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	945.056.904.437	533.880.884.575
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.298.370.810.178	1.300.917.711.407
Jumlah	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624

Sumber: LKPP 2021, Kementerian Keuangan, 2022

B. ANALISIS BELANJA NEGARA

1. Realisasi Pos Belanja Negara Tahun 2021

Realisasi penyerapan anggaran belanja negara tahun 2021 sebesar Rp 2.786,4 triliun atau 101,32% dari pagu tahun 2021. Realisasi ini terdiri dari realisasi belanja pusat sebesar Rp 2.000,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) senilai Rp 785,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 22,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam APBN TA 2021 akan mendorong belanja pemerintah lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan peranan strategis belanja pemerintah untuk menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Selanjutnya, menimbang akselerasi strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, maka evaluasi atas tantangan pelaksanaan TKDD membuahkan arah kebijakan yaitu:

- a. Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

- b. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* untuk mendukung pencapaian target RPJMN
- c. Mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan).
- d. Redesain pengelolaan TKDD dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas
- e. meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS)

Tabel Error! No text of specified style in document..19.
Realisasi Belanja Negara Tahun 2021 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	TA 2021 (Audited)			TA 2020 (Audited)
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	2.000,70	102,36%	1.832,95
1. Belanja Pegawai	421,14	387,75	92,07%	380,53
2. Belanja Barang	362,48	530,06	146,23%	422,34
3. Belanja Modal	246,78	239,63	97,10%	190,92
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	373,26	343,50	92,03%	314,09
5. Belanja Subsidi	175,35	242,09	138,06%	196,23
6. Belanja Hibah	6,78	4,32	63,69%	6,28
7. Belanja Bantuan Sosial	161,44	173,65	107,57%	202,53
8. Belanja Lain-lain	207,32	79,70	38,45%	120,04
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	785,71	98,77%	762,53
Transfer ke Daerah	723,48	713,85	98,67%	691,43
1. Dana Perimbangan	688,68	679,59	98,68%	652,10
Dana Transfer Umum	492,25	494,95	100,55%	475,52
a. Dana Bagi Hasil	101,96	117,16	114,90%	93,91
b. Dana Alokasi Umum	390,29	377,79	96,80%	381,61
Dana Transfer Khusus	196,42	184,64	94,00%	176,58
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65,25	57,07	87,47%	50,18
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131,18	127,57	97,25%	126,40
2. Dana Insentif Daerah	13,50	13,46	99,74%	18,46
3. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,32	100,00%	1,32
4. Dana Otonomi Khusus	19,98	19,48	97,50%	19,56
Dana Desa	72,00	71,85	99,80%	71,10
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2.750,03	2.786,41	1,01	2.595,48

Sumber: LKPP 2021

Realisasi belanja negara TA 2021 sebesar Rp2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.750 triliun. Belanja negara TA 2021 lebih besar Rp190,9 triliun atau naik 7,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.595,5 triliun. Realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah dan dana desa.

Realisasi belanja pemerintah pusat TA 2021 sebesar Rp 2.000,7 triliun atau 102,36 persen dari APBN sebesar Rp1.954,5 triliun. Hal ini berarti realisasi belanja pemerintah pusat TA 2021 lebih besar Rp167,75 triliun atau lebih tinggi 9,15 persen dari realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.832,95 triliun.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa TA 2021 sebesar Rp785,7 yang berarti 98,77 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp795,47 triliun. Hal ini berarti realisasi transfer ke daerah TA 2021 ini lebih tinggi Rp22,4 triliun atau naik 3,24 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp691,4 triliun.

Realisasi dana perimbangan TA 2021 sebesar Rp679,58 triliun, yang berarti 98,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp688,67 triliun. Hal ini berarti realisasi dana perimbangan TA 2021 ini lebih besar Rp27,48 triliun atau naik 4,22 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp652,1 triliun. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp117,16 triliun atau 114,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp101,96 triliun. Hal ini berarti realisasi DBH TA 2021 ini lebih tinggi Rp23,25 triliun atau naik 24,76 persen dari realisasi TA 2020.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp377,8 triliun atau 96,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp390,3 triliun. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2021 ini lebih kecil Rp3,8 triliun atau turun 1,00 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp381,6 triliun. Penurunan realisasi DAU disebabkan terutama oleh kebijakan refocusing pagu DAU yang dipengaruhi adanya ketentuan penyaluran kembali atas seluruh penundaan DAU terhadap pemerintah daerah yang belum menyampaikan persyaratan penyaluran serta penyaluran kembali atas penundaan DAU terkait pemenuhan belanja wajib maupun sanksi penyampaian informasi keuangan daerah.

Realisasi dana transfer khusus TA 2021 sebesar Rp184,6 triliun yang berarti 94,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp196,4 triliun. Hal ini berarti realisasi dana transfer khusus TA 2021 ini lebih besar Rp8,06 triliun atau 4,56 persen lebih tinggi dari realisasi TA 2020 sebesar Rp176,6 triliun.

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 sebesar Rp13,46 triliun atau 99,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp13,5 triliun. Hal ini berarti realisasi DID TA 2021 ini lebih kecil Rp 4,9 triliun atau turun 27,04 persen dari realisasi TA 2020 yang sebesar Rp18,45 triliun.

Realisasi dana otonomi khusus TA 2021 sebesar Rp19,48 triliun yang berarti 97,50 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp19,98 triliun. Realisasi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2021 sebesar Rp1,32 triliun yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi tersebut menunjukkan adanya intensitas konsistensi antara pusat dan daerah.

Tabel Error! No text of specified style in document..20.
Rincian Realisasi Dana Desa

Jenis Dana Desa	Realisasi Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai	20.242.125.684.974
Covid-19 Earmark 8 persen)	4.121.210.167.401
Mandiri Non BLT)	1.374.283.286.147
Reguler Non BLT)	46.116.090.872.507
Jumlah	71.853.710.011.029

Sumber: LKPP 2021

Realisasi Dana Desa (DD) TA 2021 sebesar Rp71.853.710.011.029 yang berarti 99,80 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp72.000.000.000.000, naik sebesar Rp753.191.427.173 atau lebih besar 1,06 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 yang sebesar Rp71.100.518.583.856.

Realisasi DD mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen dibandingkan dari periode tahun 2020 karena kenaikan pagu alokasi DD sebesar 3,04 persen. Untuk penyaluran DD tahun 2021 dipengaruhi oleh relaksasi penyaluran DD termasuk komponen Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DD yang diatur dalam PMK Nomor 94/PMK.07/2021. Terdapat 22 Desa yang DD-nya tidak tersalur sepenuhnya khususnya pada BLT dari DD. Pada Penyaluran DD pada TA 2021 terdapat penyaluran *earmarked* 8 persen untuk penggunaan penanggulangan Covid-19 dan disalurkan sebesar 8 persen dari alokasi DD per desa.

2. Analisis Post Belanja 2021

Realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pada tahun 2021 hanya mencapai 87,96% dari alokasi. Sedangkan serapan belanja dalam APBN 2021 melebihi target yang ditetapkan.

Tabel Error! No text of specified style in document..21.
Rincian realisasi anggaran PEN pada TA 2021 (dalam triliun rupiah)

Klaster/ Program	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Alokasi
I. Kesehatan	214,96	198,14	92,17 %
II. Perlindungan Sosial	186,64	167,72	89,86 %
III. Program Prioritas	117,94	105,56	89,50 %
IV. Dukungan UMKM dan Korporasi*	162,40	116,15	71,52 %
V. Insentif Usaha	62,83	67,57	107,54 %
Jumlah	744,77	655,14	87,96 %

Sumber: LKPP 2021

Hal ini menjadi perhatian mengingat pembengkakan anggaran belanja diklaim oleh pemerintah dilakukan untuk pemulihan Covid-19 dan pemulihan perekonomian pusat dan daerah. Rincian realisasi anggaran PEN pada TA 2021 ditampilkan pada Tabel 3.11. Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi program PEN tidak mencapai 100%.

Realisasi program dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi pada tahun 2021 realisasinya hanya sebesar 71,52% saja. Realisasi tersebut merupakan realisasi terendah jika dibandingkan dengan klaster-klaster lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat berarti untuk perekonomian nasional. Selain itu dana PEN juga mendapatkan respon positif dari UMKM. Survei Mandiri Institute menunjukkan bahwa sebanyak 83% UMKM merasa terbantu dengan bantuan Pemerintah (Laoli, 2020). Meski demikian, bantuan ini terealisasi dengan perlahan, terutama sampai pertengahan masa pandemi di sekitar bulan Agustus. Menteri Koperasi dan UMKM mengatakan keterbatasan data menjadi problem utama penyaluran dana bantuan untuk UMKM. Data kementerian tidak cukup baik, sementara banyak UMKM di Indonesia yang tidak *bankable* apalagi memiliki NPWP. Hal ini terkait dengan tingginya informalitas yang menyebabkan banyak UMKM tidak terdata dengan baik.

Dari data Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 hanya terserap sebesar 87,47% dari pagu APBN. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

**Tabel Error! No text of specified style in document..22.
Realisasi Anggaran TKDD Tahun 2021 (dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	785,71	98,77%
Transfer ke Daerah	723,48	713,85	98,67%
1. Dana Perimbangan	688,68	679,59	98,68%
Dana Transfer Umum	492,25	494,95	100,55%
a. Dana Bagi Hasil	101,96	117,16	114,90%
b. Dana Alokasi Umum	390,29	377,79	96,80%
Dana Transfer Khusus	196,42	184,64	94,00%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65,25	57,07	87,47%
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131,18	127,57	97,25%
2. Dana Insentif Daerah	13,50	13,46	99,74%
3. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,32	100,00%
4. Dana Otonomi Khusus	19,98	19,48	97,50%
Dana Desa	72,00	71,85	99,80%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2.750,03	2.786,41	1,01

Sumber: LKPP 2021

Melihat dari definisi ini berarti kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, maka akan didanai oleh pemerintah pusat. Namun dalam kenyataannya kondisinya menjadi berbalik, kata prioritas nasional membuat seluruhnya menjadi domain pemerintah pusat mulai dari perencanaan, menentukan besaran alokasi DAK sampai kepada evaluasinya. Pada akhirnya daerah penerima DAK hanya berperan sebagai eksekutor tanpa memiliki kebijakan apapun dalam pengelolaan. Padahal pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami kekhususan dan kebutuhan daerahnya. Selain itu hal lain yang juga menjadi kendala adalah regulasi atau petunjuk teknis DAK yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan perencanaan di daerah.

C. ANALISIS MANDATORY APBN TAHUN 2021

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang (Kementerian Keuangan RI, 2018). Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji dan 5% dari APBN (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 juga berdampak terhadap kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Alokasi dan realisasi mandatory selama 2021 ditampilkan pada Tabel 3.13.

Tabel Error! No text of specified style in document..23.
Alokasi & Realisasi *Mandatory Spending* Dalam APBN 2021 (Rp Triliun)

No	<i>Mandatory Spending</i>	Alokasi		Realisasi APBN 2021	Realisasi (%)
		Alokasi Mandatory	APBN 2021		
1	Alokasi Pendidikan	20%	550.00	557.50	101.36
2	Alokasi Kesehatan	5%	169.72	340.16	200.42
3	Alokasi TKDD	-	723.47	713.85	98.67
	a. DAU	26%	390.29	377,79	96.80
	b. DBH	-	101.96	117.15	114.90
	a. DAK Fisik	-	65.24	57.07	87.47
	b. DAK Non Fisik	-	131.17	127.56	97.25
	c. Dana Otsus	2%	19,98	19,48	75.50
	d. Dana Keisti. DIY	-	1,32	1,32	100
4	Dana Desa	-	72.00	71,85	99,80

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 (diolah)

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional". Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka di dalam UU APBN TA 2021 total alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp550,0 triliun atau sebesar 20 persen dari APBN TA 2021.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji. Pada APBN TA 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp169,72 triliun. Pada pelaksanaan APBN TA 2021, Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan tidak mengajukan perubahan APBN TA 2021 dan Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga alokasi *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, total anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp557,5 triliun dan total anggaran kesehatan menjadi sebesar Rp340,16 triliun.

Pada tahun 2021, Pemerintah tidak melakukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021, pemerintah melakukan *refocusing* anggaran. Selain belanja K/L juga dilakukan perubahan alokasi dan *refocusing* TKDD yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Tujuan kebijakan penyesuaian belanja negara (kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja TA 2021) adalah untuk melaksanakan kebijakan pengadaan vaksin, program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.



EVALUASI DAN KINERJA PELAKSANAAN APBN 2021

A. GAMBARAN UMUM RKP 2021

RKP tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RKP tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 86 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP tahun 2021 dimutakhirkan berdasarkan UU Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2020.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat berpengaruh bagi Indonesia, karena terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan, serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, maka tema RKP Tahun 2021 yang disusun Pemerintah adalah ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial***.

RPJMN 2020-2024 memiliki tujuh agenda pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dengan daya ungkit tinggi. Tujuh Prioritas nasional (PN) dalam RKP tahun 2021 ini, rencana pemerintah

tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Dokumen RKP tahun 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan *Major Project* (MP) dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun tujuh PN RKP tahun 2021 meliputi

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP Tahun 2021 merupakan upaya pemerintah yang responsif dan adaptif untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi Covid-19, agar Indonesia kembali bangkit dalam melanjutkan pencapaian agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2021 merupakan laporan atas pencapaian kinerja K/L Tahun 2021 yang didasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam RKP 2021, baik yang bersifat makro maupun mikro, dan diarahkan untuk mencapai kinerja sasaran utama yang menggambarkan pencapaian Pembangunan Nasional, mencakup sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2021. Evaluasi LKjPP Tahun 2021 menganalisis capaian kinerja sasaran utama pembangunan nasional yang berhasil maupun yang belum berhasil dicapai pada akhir tahun 2021. Bagian berikut ini akan

diuraikan lebih lengkap tentang capaian sasaran pembangunan dan prioritas nasional.

B. EVALUASI TERHADAP SASARAN PEMBANGUNAN 2021

Sasaran Pembangunan Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator pembangunan dan realisasi capaian di tampilan pada Tabel 4.1.

Tabel Error! No text of specified style in document..24.
Realisasi Capaian Sasaran Indikator Pembangunan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1. Meningkatkan Percepatan dan Pemulihan Ekonomi						
Pertumbuhan Ekonomi	5.2-5.5	-2.07	0	5.0	3.69	73.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4.8-5.0	7.07	68.6	7.7-9.1	6.49	115.71
Rasio Gini (Nilai)	0.375-0.380	0.385	98.68	0.375-0.380	0.381	94.47
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	-	-	-	23.55-24.05	65.90	274
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia						
Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	72.5	71.94	99.21	72.78-72.95	72.29	99.33
Tingkat Kemiskinan (%)	8.5-9.5	10.19	92.74	9.2-9.7	9.71	99.89

Dengan penanganan Covid-19 yang baik dan efektif, ekonomi mulai bergerak membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1- 2021 berkontraksi 0,7% disebabkan melonjaknya kasus Covid-19 setelah Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada Triwulan II pertumbuhan ekonomi naik sebesar 7,07 sejalan dengan efektifnya pengendalian Covid-19. Kemudian pertumbuhan ekonomi Q3-2021 mengalami perlambatan dikarenakan merebaknya varian Delta, tercatat pertumbuhan Q3-2021 sebesar 3,5%. Meski sempat melambat, tingkat pertumbuhan ekonomi Q3-2021 Indonesia di tengah gelombang Delta terhitung masih lebih baik dengan beberapa negara mitra kita seperti Thailand atau Malaysia yang mengalami kontraksi masing-masing -0,3% dan -4,5% di Q3-2021. Sejalan dengan melandainya kasus Covid-19 yang dipicu oleh akselerasi program vaksinasi di Triwulan 4, pertumbuhan Q4-2021 menguat pada angka 5,02 dan membuat kinerja

ekonomi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% (BPS, 2022). Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3.69% (yoy), hal ini cukup menggembirakan karena munculnya varian baru Delta. Namun demikian, hasil capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar 5%.

Adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, yang diikuti dengan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk, termasuk pekerja, berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Di saat yang sama, kinerja industri juga mengalami penurunan yang berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Namun, pada triwulan III-2021 diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami perbaikan. Pada Agustus 2021 tercatat TPT sebesar 6,49 persen atau lebih rendah 0,58 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,07 persen. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 9,77 juta orang mengalami penurunan 0,67 juta orang menjadi sebanyak 9,10 juta orang pada Agustus 2021. Secara spasial, TPT tertinggi terdapat di Kepulauan Riau (9,91%), Jawa Barat (9,82%), dan Banten (8,98%). Jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Secara keseluruhan terjadi penurunan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada daerah ini. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama yang bersifat insentif dunia usaha dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa dari Target APBN TPT adalah sebesar 7.7% tetapi pemerintah mampu menekan sampai pada 6.49%, jadi ini lebih baik dibandingkan dengan target APBN.

Indikator kemiskinan juga merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan nasional. Beberapa program penanggulangan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan seperti Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada tahun 2021 berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Diskon Listrik, BLT Desa, Subsidi Kuota Internet, Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Kartu Pra Kerja, percepatan penyaluran belanja PEN, terutama perlinsos yang tepat sasaran serta percepatan pengadaan dan pelaksanaan vaksin. Indikator kemiskinan masih lebih rendah sedikit dari target APBN, dengan tingkat capaian sebesar 99.80% dari target APBN 2021.

Berdasarkan data BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah sebesar 0,381 per September 2021. Angka ini menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2020 sebesar 0,385. Secara spasial, tingkat ketimpangan di perdesaan menurun menjadi 0,315 per Maret 2021 dan kembali turun ke 0,314 pada September 2021. Hal ini menandakan adanya perbaikan kesenjangan di perdesaan yang didorong oleh

pemerataan ekonomi dan peran Dana Desa. Sementara itu ketimpangan di perkotaan sedikit meningkat menjadi 0,401 pada Maret 2021 dan kemudian menurun menjadi 0,398 pada September 2021. Namun demikian, realisasi secara *aggregate* tahun 2021, realisasi rasio gini masih lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2021 dengan capaian kinerja hanya mencapai 94.47%.

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan komitmen nasional yang dilaksanakan pada 5 (lima) sektor yaitu sektor energi, sektor industrial *process and product use* (IPPU), sektor pertanian, serta sektor kehutanan dan limbah. Komitmen nasional dalam menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 dengan tanpa syarat (*unconditional*) dan sampai 41% dengan syarat (*conditional*). Hasil terlihat menggembirakan karena realisasinya baik dibandingkan dengan target APBN 2021. Sasaran pembangunan nasional berikutnya adalah meningkatkan kualitas SDM dengan menekankan pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa realisasi masih lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2021, dengan capaian masing-masing sebesar 99.33% dan 99.89%. Secara keseluruhan perlu diapresiasi karena di tengah tantangan perkembangan varian Covid-19, pemerintah masih mampu dan berusaha untuk mencapai target APBN 2021.

C. EVALUASI TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Tema RKP Tahun 2021 yang disusun Pemerintah adalah ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial***, dengan menetapkan tujuh Prioritas Nasional, dengan uraian capaian kinerja diuraikan berikut ini.

1. Prioritas Nasional 1

Prioritas Nasional 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan menetapkan dua sasaran utama yaitu (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Tabel Error! No text of specified style in document..25.
**Realisasi Capaian PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
 Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2021**

No	Sasaran Indikator	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
A: Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan					
1	Porsi EBT dalam bauran Energi nasional	%	14.50	11.70	80.69
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91.60	87.20	95.20
3	Penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP))	Jumlah WPP	11	11	100.00
B: Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian					
1	Rasio kewirausahaan nasional	%	3.65	2.89	79.18
2	Pertumbuhan PDB Pertanian	%	3.32-3.88	1.84	55.42
3	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	%	4.68-5.46	3.39	72.44
4	Kontribusi PDB industri pengolahan	%	19.63-19.84	19.25	98.06
5	Nilai devisa pariwisata	US\$ Miliar	0.36-0.37	0.55	148.65
6	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4.20	4.40	104.76
7	Penyediaan lapangan kerja	Juta orang	2.30-2.90	2.60	100.00
8	Pertumbuhan investasi (PMTB)	%	6.40	3.80	59.38
9	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	%	8.07	35.11	435.07
10	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	%	3.50-5.10	24.00	470.59
11	Rasio perpajakan terhadap PDB	%	8.18	9.10	111.25

Sumber: LKPP 2021 dan Kemenpan RB 2022 (diolah)

Dari 14 indikator kinerja pada prioritas nasional, ada sebanyak 7 indikator yang belum mencapai target APBN 2021. Indikator tersebut adalah (1) Porsi EBT dalam bauran energi nasional, (2) skor pola pangan harapan, (3) rasio kewirausahaan nasional, (4) pertumbuhan PDB Pertanian, (5) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (6) kontribusi PDB industri pengolahan, (7) dan pertumbuhan investasi (PMTB).

2. Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan menetapkan dua sasaran utama yaitu (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, dan (2) Terjaganya

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia.

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerjasama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

Tabel Error! No text of specified style in document..26.
Realisasi Capaian PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
A	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia				
1	Laju pertumbuhan PDRB KT	%/tahun	4.2-6.1	4.86	100.00
2	IPM KTI	Nilai Min-Max	61.1-77.7	60.62-76.88	99.06
3	Persentase penduduk miskin	%	11.5	11.62	98.96
B	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia				
1	Laju pertumbuhan PDRB KBI	%/tahun	4.5-5.4	3.43	76.22
2	IPM KBI	Nilai Min-Max	70.1-82.5	69.90-81.11	98.96
3	Persentase penduduk miskin KBI	%	8.4	9.23	90.12

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa hanya indikator laju pertumbuhan PDRB KT yang telah mencapai target APBN 2021. Sementara 5 indikator lainnya belum mencapai target APBN 2021. Indikator tersebut adalah IPM KTI, Prosentase penduduk miskin, laju pertumbuhan KBI, IPM KBI dan persentase penduduk miskin di KBI.

3. Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*, peningkatan pemerataan layanan

berkualitas, penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran *virtual*, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Realisasi dari target APBN 2021 untuk prioritas nasional ketiga ditampilkan pada Tabel 4.4. Indikator layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan termasuk yang paling rendah. Hal ini ditenggarai lebih disebabkan karena adanya pandemic Covid-19.

Tabel Error! No text of specified style in document..27.
Realisasi Capaian PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya saing

No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
I	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan				
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Per wanita subur usia 15-49 tahun	2.24	2.24	100.00
2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	%	99.00	99.11	100.11
II	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk				
1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosia	%	-	-	-
2	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosi	%	85.00	86.96	102.31
3	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	72.00	64.31	89.32
III	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan				
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	217.00	305.00	59.45
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21.10	24.40	84.36
3	Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	252.00	301.00	80.56
4	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	%	21.80	21.80	100.00
5	Persentase merokok penduduk usia 10 – 18 tahun	%	9.00	9.10	98.89
6	Nilai rata-rata hasil PISA:				
	a. Membaca	nilai	-	-	-
	b. Matematika	nilai	-	-	-

	c. Sains	nilai	-	-	-
7	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8.85	8.97	101.36
8	Harapan lama sekolah	Tahun	13.40	13.08	97.61
IV	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda				
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	60.10	66.89	98.22
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91.28	91.27	99.99
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	54.59	54.00	98.92
V	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan				
1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	%	35.00	35.83	102.30
VI	Meningkatnya produktivitas dan daya saing				
1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	%	45.43	45.69	100.57
2	Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university				
	a. Top 200	PT	0	0	0
	b. Top 300	PT	1	1	100
	c. Top 500	PT	2	2	100
3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	%	41.55	40.39	97.21
4	Peringkat Global Innovation Index	Peringkat	80-85	87.00	97.65

Sumber: RKP, KEM-PPKF dan LKPP 2021

4. Prioritas Nasional 4

Prioritas Nasional 4 adalah revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan dimana Pemerintah menetapkan enam indikator kerja utama seperti yang terlihat di Tabel 4.5. Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

Tabel Error! No text of specified style in document..28.

Realisasi Capaian PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Indikator/Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya					
	Indeks Capaian revolusi Mental	Nilai	70.78	70.78	100.00
2 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan					
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58.21	58.21	100.00
3 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial					
	Indeks Pembangunan Masyarakat	Nilai	0.63	0.63	100.00
4 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat					
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	74.60	72.39	97.04
5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa					
	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	55.00	54.01	98.20
	Median Usia Kawin Pertama	Tahun	22.00	20.71	94.14
6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif					
	Nilai Budaya Literasi	Nilai	63.03	63.03	100.00

Sumber: RKP 2021, APBN 2021, KEM-PPKF 2021 dan LKPP 2021

Dari enam indikator, ada tiga indikator yang lebih rendah dari target APBN 2021, yaitu indeks kerukunan umat beragama, indeks pembangunan keluarga dan median usia kawin pertama. Hal ini cukup disayangkan mengingat Indonesia di kenal sebagai negara dengan ragam suku bangsa, ragam budaya dan agama. Namun demikian, indikator kerukunan umat beragama masih di bawah target APBN 2021.

5. Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional 5 adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dimana Pemerintah menetapkan lima indikator kerja utama seperti yang terlihat di Tabel 4.6. Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

tahun 2021 masih diarahkan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

Tabel Error! No text of specified style in document..29.
Capaian Kinerja PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar					
a	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	%	62.32	60.90	97.72
b	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	%	55.00	60.00	109.09
c	Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	%	6.50	7.75	119.23
d	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)	%	33.70	33.75	100.15
2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar					
a	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	Jam/100 km	2.20	2.22	100.91
b	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	%	25.00	25.00	100.00
3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan					
a	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	Kota	6.00	3.57	59.45
4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan					
a	Rasio Elektrifikasi	%	100	99.45	99.45
b	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik	kwh/kapita	1203	1123	93.35

5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK					
a	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)	%	98	96.10	98.06

Dari sekian banyak indikator untuk Prioritas Nasional 5 hanya terdapat satu indikator yang memiliki kinerja buruk yaitu meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan indikator jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Indikator ini hanya mencapai 59.45% dari target APBN 2021.

6. Prioritas Nasional 6

Prioritas Nasional 6 adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dimana Pemerintah menetapkan tiga sasaran utama seperti yang terlihat di Tabel 4.7. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana bukan alam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

Tabel Error! No text of specified style in document..30.
Capaian Kinerja PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim

No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	68.96	71.45	103.61
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim				
a	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	%	0.69	0.60	86.96
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline				
a	Persentase penurunan emisi GRK	%	23.55	65.90	279.83
b	Persentase penurunan intensitas	%	23.40	25.60	109.40

emisi GRK				
-----------	--	--	--	--

Sumber: RKP 2021, APBN 2021, KEM-PPKF 2021 dan LKPP 2021

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya satu indikator yang tidak memenuhi target APBN 2021, yaitu indikator penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.

7. Prioritas Nasional 7

Prioritas Nasional 7 adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimana Pemerintah menetapkan lima sasaran utama seperti yang terlihat di Tabel 4.8. Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini di antaranya dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*; serta pemulihan kinerja pelayanan publik.

Tabel Error! No text of specified style in document..

31. Capaian Kinerja PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	77.72	73.84	95.01
2	Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan program prioritas Pemerintah	%	65	77.23	118.82
II	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri				
1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	Nilai	96	112.06	116.73
III	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap				
1	Indeks Pembangunan Hukum	Nilai	0.55	0.54	98.18
IV	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola				
1	Persentase Instansi Pemerintah				

	dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas				
	a. K/L	%	75	90.7	120.93
	b. Provinsi	%	60	79.41	132.35
	c. Kab/Kota	%	35	25.98	74.23
V	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional				
1	Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh Wilayah NKRI yang dapat diatasi	%	100	100	100.00

Sumber: RKP 2021, APBN 2021, KEM-PPKF 2021 dan LKPP 2021

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada tiga indikator yang tidak memenuhi target APBN 2021, yaitu (1) Indeks demokrasi Indonesia, (2) Indeks pembangunan hukum, dan (3) Persentase instansi Pemerintah dengan Indeks reformasi birokrasi kategori baik ke atas kab/kota.



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang perkembangan ekonomi makro, kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tahun pelaksanaan APBN 2021, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia APBN 2021 tidak tercapai. Realisasi Pertumbuhan tumbuh positif 3.69% yoy lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2021 sebesar 5% yoy.
2. Indikator kesejahteraan yang menjadi indikator keberhasilan APBN 2021, yang tertuang dalam UU No 9 Tahun 2020 Pasal 47 tentang kemiskinan (9,2%- 9,7%), tingkat pengangguran terbuka (7,7% - 9.1%) dan gini rasio (0,377 – 0.379), Indeks pembangunan manusia (72,78 72,95), dan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan menjadi 102-104, tidak mencapai target APBN 2021. Hanya Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang dapat memenuhi target APBN 2021.
3. Mengapresiasi hasil pemeriksaan yang menghasilkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021. Pencapaian tersebut diharapkan dapat terus dijaga dan dipertahankan serta ditindaklanjuti beberapa temuan BPK yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel;
4. Beberapa temuan penting dari 27 permasalahan di atas diantaranya soal pengelolaan piutang bukan pajak pada 18 K/L sebesar Rp1,22 triliun dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 36 K/L minimal sebesar Rp3,97 triliun belum sesuai ketentuan serta pengelolaan insentif

dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai;

5. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp1.647,8 triliun. Lengkapnya, dari sisi realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi COVID-19;
6. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269 triliun atau 125,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp215 triliun. Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp343,8 triliun;
7. Penopang utama pendapatan negara dari Januari-November 2021 adalah naiknya beberapa harga komoditas dunia yang menjadi tumpuan ekspor seperti PPh Migas yang naik hingga 57,7 persen dari tahun lalu, termasuk sumbangannya ke PPN yang juga naik 19,8 persen secara tahunan. Dampaknya, penerimaan perpajakan realisasinya lebih baik ketimbang tahun lalu. Sektor lain yang selalu menjadi langganan penopang pendapatan negara adalah penerimaan bea dan cukai.
8. Realisasi Penyerapan Anggaran belanja negara tahun 2021 sebesar Rp 2.786,4 triliun atau 101,32% dari pagu tahun 2021. Realisasi ini terdiri dari realisasi belanja pusat sebesar Rp 2.000,7 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai Rp 785,7 triliun.
9. Realisasi Program PC PEN pada tahun 2021 hanya mencapai 87.96% dari alokasi. Sedangkan serapan belanja dalam APBN 2021 melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian mengingat pembengkakan anggaran belanja diklaim oleh pemerintah dilakukan untuk pemulihan covid-19 dan pemulihan perekonomian pusat dan daerah.
10. Realisasi program dukungan UMKM dan Koperasi pada tahun 2021 realisasinya hanya sebesar 71,52% saja. Realisasi tersebut merupakan realisasi terendah jika dibandingkan dengan klaster-klaster lainnya.
11. Dana alokasi khusus (DAK) untuk program prioritas hanya terserap 87,47% dari pagu APBN.

12. Realisasi Capaian Prioritas Nasional ketiga dan kedua, relative memiliki kinerja yang buruk dalam pencapaian target APBN 2021. PN ketiga adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing dan PN kedua adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih gagal meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan belum mampu mengurangi kesenjangan dan pemerataan antar-wilayah.
13. Mandatory APBN anggaran Pendidikan dan Kesehatan relatif tercapai dibandingkan dengan DAU, Dana Otsus dan Dana Desa. Bahkan dana Kesehatan lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, sehubungan dengan kaian terhadap pelaksanaan APBN 2021 antara lain:

1. Transformasi penerimaan pajak harus didorong agar bertumpu pada PPh orang pribadi. Sebab bila masih bertumpu pada PPh badan sangat berisiko terhadap kondisi ekonomi domestik dan global, data menunjukkan penerimaan perpajakan masih bertumpu pada PPh badan yang sejumlah 3,3 juta usaha sedangkan yang wajib SPT hanya sebanyak 1,47 juta, di sisi lain realisasi SPT hanya sebesar 963 ribu SPT, kondisi ini memiliki risiko besar;
2. Merekomendasikan beberapa kebijakan penting yang harus dilakukan pemerintah melalui pembenahan sistem penerimaan perpajakan nasional dan mengoptimalkan peluang sumber penerimaan baru pada tahun 2022, yakni diberlakukannya pajak karbon dan pengampunan pajak dari 1 Januari–30 Juni 2022;
3. Kembali mengingatkan atas hasil review Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang diterbitkan BPK pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sebanyak 443 dari 503 Pemda (88,07 persen) yang di review masih masuk dalam kategori “Belum Mandiri”. Kondisi ini masih sangat memprihatinkan;
4. Rasio perpajakan pernah mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2001 hingga 2008, dari sebelumnya 11,3 persen menjadi 13,3 persen terhadap PDB. Namun demikian, penurunan terus terjadi hingga pada 2021 rasio pajak berada pada angka 9,12 persen. Celah pendapatan yang ada harus dapat dioptimalkan seperti mengejar potensi pajak yang belum terpungut, meningkatkan akurasi perhitungan pajak sehingga dapat mengurangi perbedaan antara jumlah kewajiban dengan pajak yang dibayarkan oleh WP.

5. Puskadaran menilai Pemerintah belum mampu menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan. Secara historis, tren penerimaan perpajakan sangat berfluktuasi dan tidak stabil. Selama masa ledakan komoditas, penerimaan perpajakan mampu mencatatkan pertumbuhan yang signifikan hingga 2 digit, namun setelah itu pertumbuhan perpajakan tumbuh tidak menentu. Fluktuasi tersebut menandakan reformasi fiskal dan administrasi perpajakan belum berjalan optimal;
6. Puskadaran memberikan pandangan agar DPD dapat mengingatkan Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut;
7. Puskadaran menilai pertumbuhan ekonomi tahun lalu belum sesuai target APBN 2021, secara khusus menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen belum dapat terwujud sesuai dengan target APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar 5 persen. Namun, jika merujuk pencapaian tahun sebelumnya di angka minus 2,07 persen maka capaian 3,69 persen dapat mengapresiasi Pemerintah dalam menjalankan dan mengelola APBN 2021 di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pencapaian ini membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas dunia. Posisi ini diharapkan menjadi fondasi awal untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*).
8. Penyempurnaan Data penerima program PC PEN tahun 2021 harus dilakukan mengingat masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan keterbatasan data juga menjadi masalah dalam penyerapan anggaran yang kurang maksimal tersebut.
9. Dari pemetaan terhadap populasi program pemberdayaan UMKM, setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang telah berjalan cukup lama (*sustainable*) dengan nilai anggaran dan jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta menasar kelompok rentan (*miskin, perempuan*). Hal ini kurang efektif mengingat banyaknya K/L yang terlibat dengan egosektoral masing-masing sehingga bantuan tersebut penyalurannya tidak maksimal.
10. Karena DAK ditujukan untuk mencapai prioritas-prioritas nasional yang sudah menjadi kewenangan daerah, seyogianya pemerintah daerah lebih berperan dalam perencanaan DAK. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dan memahami kekhususan dan kebutuhan daerahnya. Oleh sebab itu kami merekomendasikan agar perencanaan DAK menerapkan pola yang lebih *bottom-up* dan terintegrasi ke dalam mekanisme dan siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dengan kata lain, perencanaan DAK sebaiknya melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Jakarta.
- BPK RI. (2021). Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat Tahun 2020. Jakarta: BPK RI.
- Harahap, M.F. (2020). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19 (ombudsman.go.id, June 16, 2020) in <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dankorupsi-bansos-covid-19>
- Hasan, M., dkk.(2020). Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19 (antikorupsi.org, April, 2020) in https://antikorupsi.org/sites/default/files/korupsi_dan_masalah_penanganan_covid19_seknas_fitra.pdf
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Apakah yang disebut dengan mandatory spending. Retrieved from DJPK Kemenkeu: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (audited). Jakarta.
- Kementerian PAN RB. (2021). Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2020. Jakarta: Kementerian PAN RB.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, edisi revisi, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2020). Analisis Ringkas Cepat (ARC) Look Out 2020: Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa . Retrieved from <http://puskajianggran.dpr.go.id/>
- Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: analisis kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19. ndonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 159-171.

KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (P2-APBN) TAHUN ANGGARAN 2021

Buku dengan judul “Kajian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (P2-APBN) Tahun Anggaran 2021” ini merupakan hasil analisis dari pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBN Tahun 2021. Capaian atas target ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan Pemerintah sebelumnya.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa target Pemerintah dalam APBN Tahun 2021 masih belum optimal tercapai. Realisasi Pertumbuhan tumbuh positif 3.69% yoy lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2021 sebesar 5% yoy. Hanya Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang dapat memenuhi target APBN 2021, indikator kesejahteraan lainnya tidak tercapai. Mengapresiasi hasil pemeriksaan yang menghasilkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Realisasi Penyerapan Anggaran belanja negara tahun 2021 sebesar Rp 2.786,4 triliun atau 101,32% dari pagu tahun 2021. Realisasi ini terdiri dari realisasi belanja pusat sebesar Rp 2.000,7 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai Rp 785,7 triliun.

Atas kondisi diatas, hasil analisis merekomendasikan beberapa kebijakan penting yang harus dilakukan Pemerintah melalui pembenahan sistem penerimaan perpajakan nasional dan mengoptimalkan peluang sumber penerimaan baru pada tahun 2022, yakni diberlakukannya pajak karbon dan pengampunan pajak dari 1 Januari–30 Juni 2022. Salin dari itu, penyempurnaan data penerima program PC PEN tahun 2021 harus dilakukan mengingat masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan keterbatasan data juga menjadi masalah dalam penyerapan anggaran yang kurang maksimal tersebut.

Tim Penulis